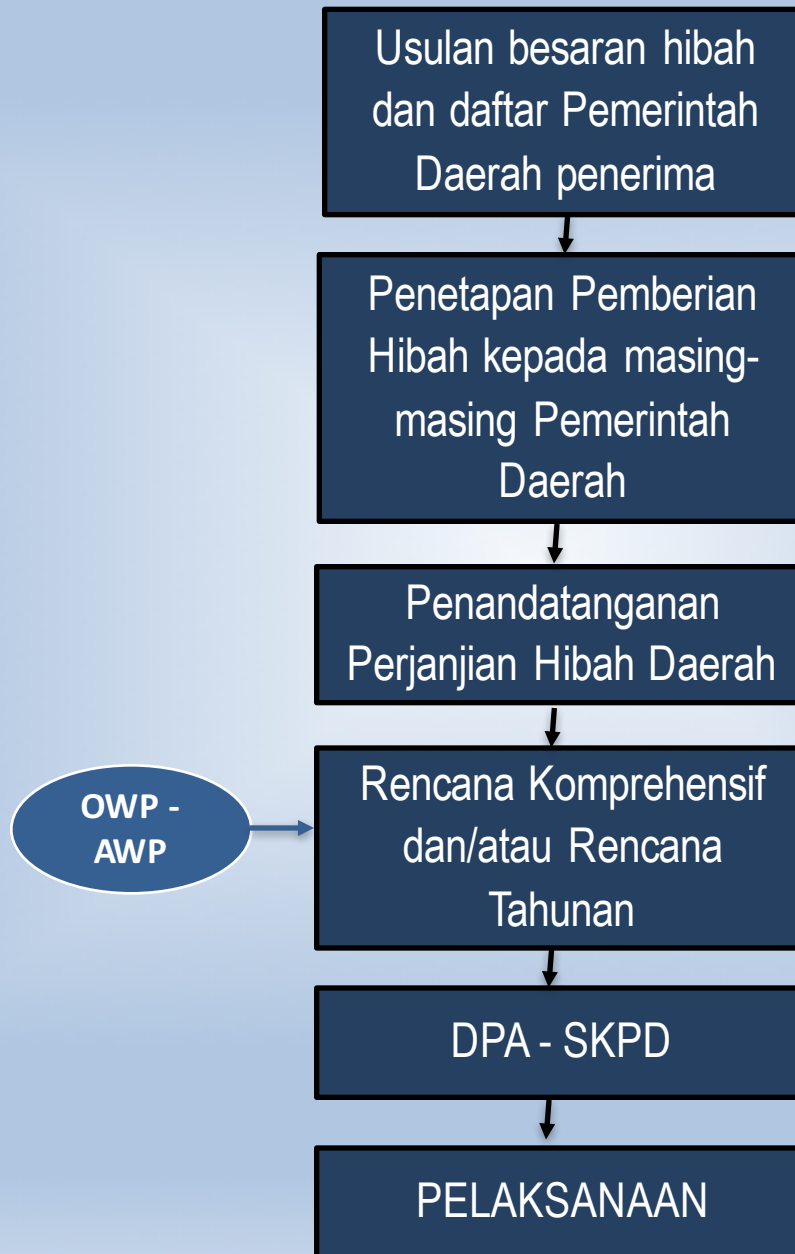




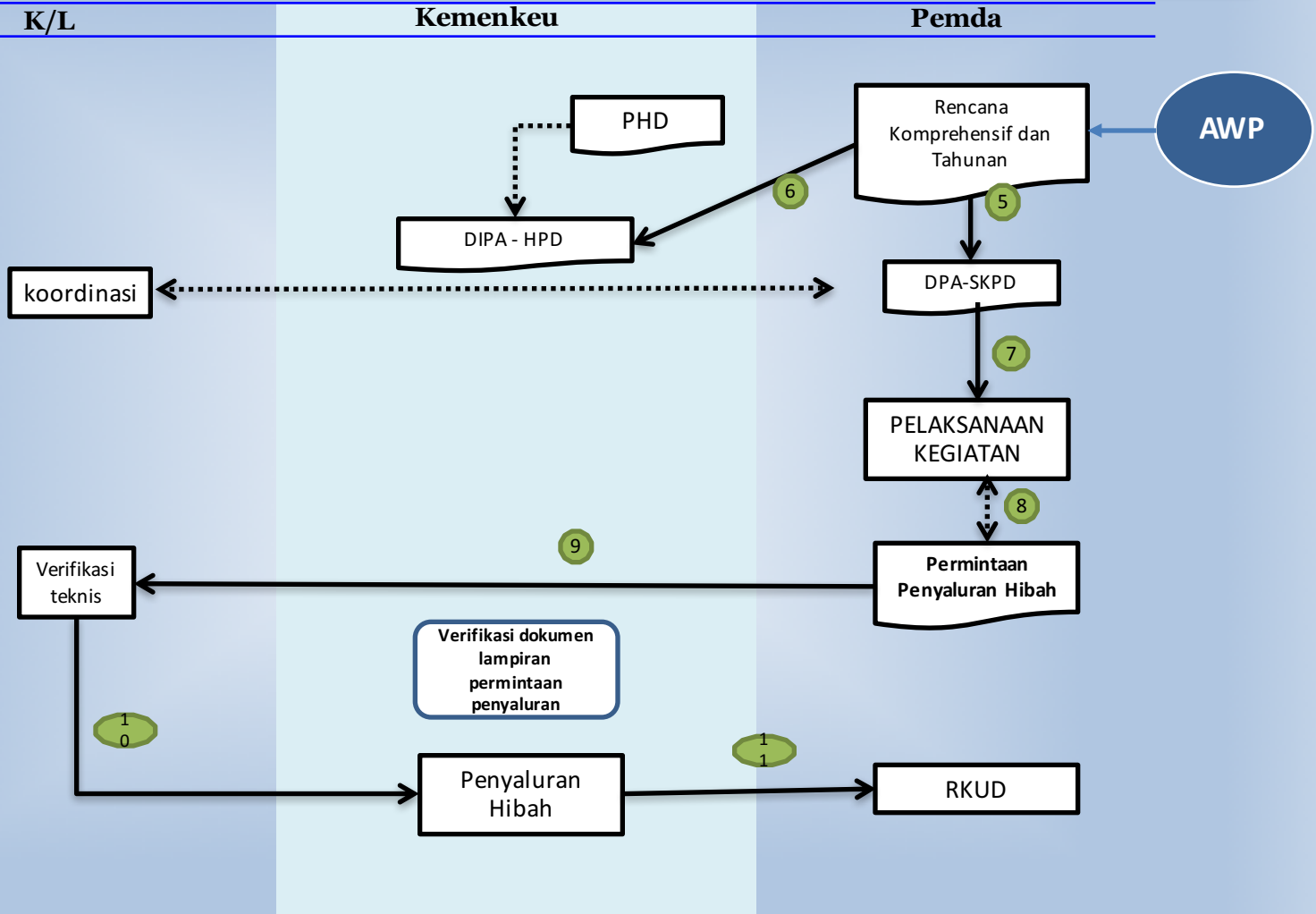
OWP-AWP

***RESULT BASED LENDING - RBL
PINJAMAN BERBASIS HASIL
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)***

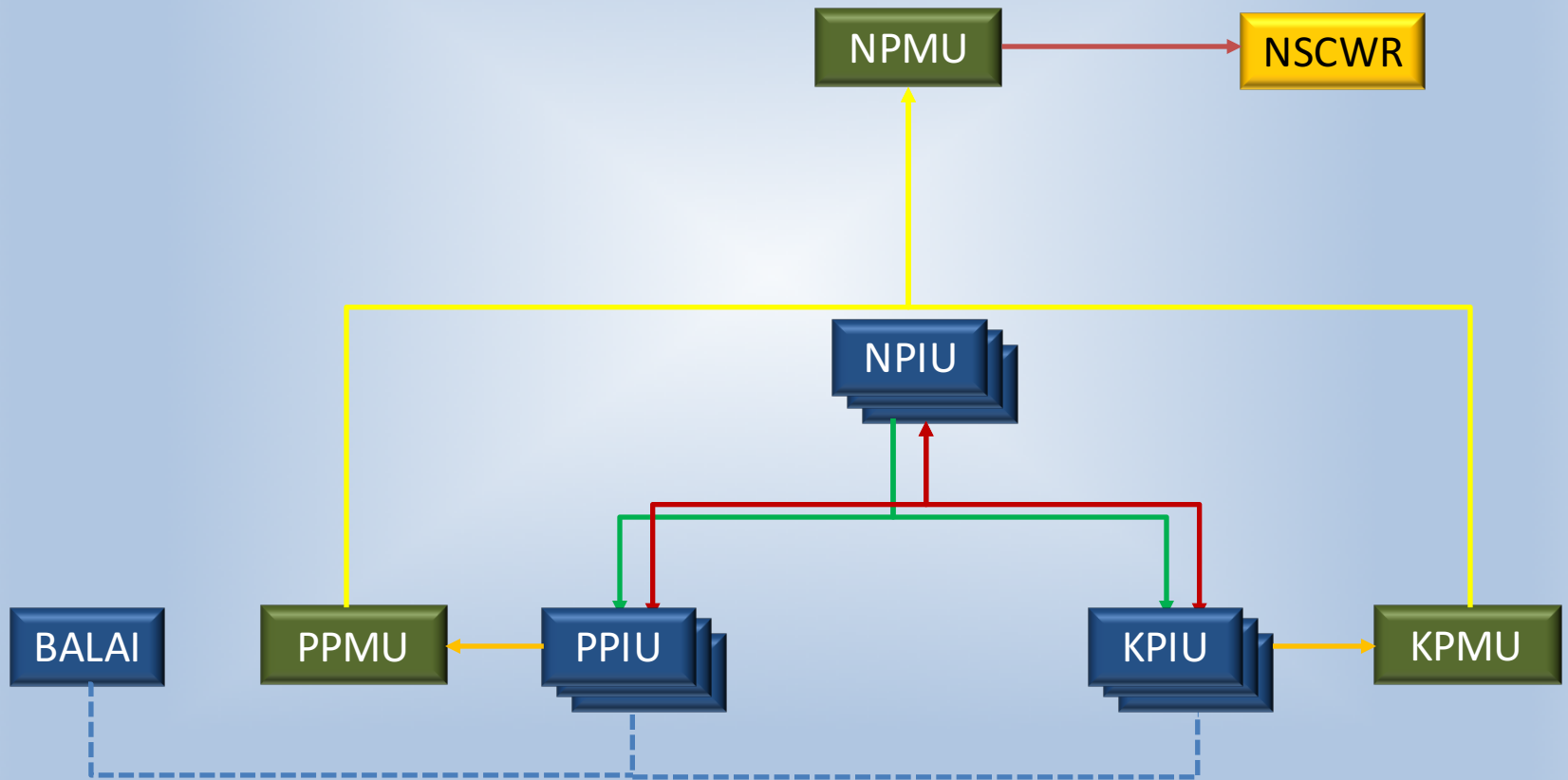
PROSES HIBAH / PENERUSHIBAHAN



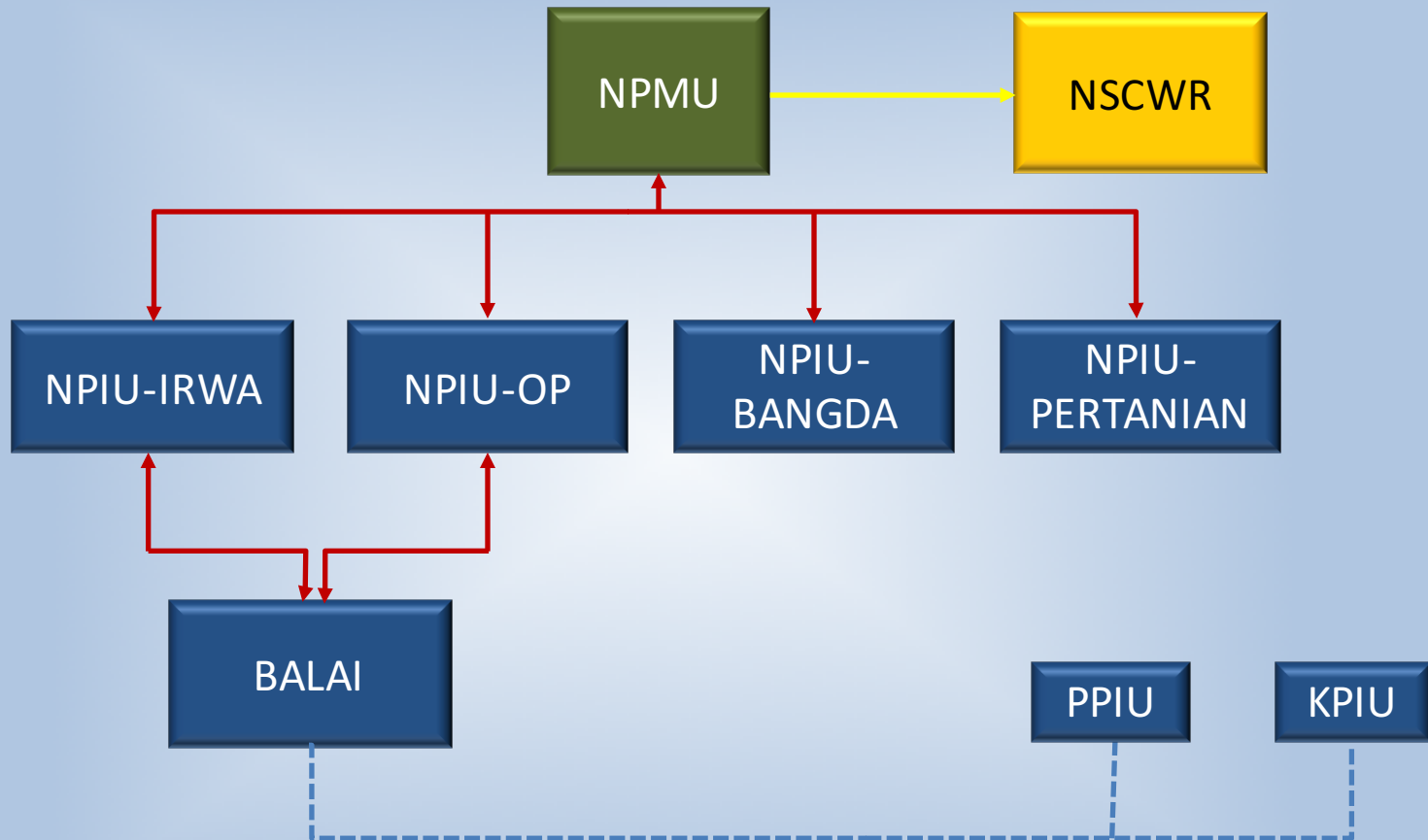
PROSES VERIFIKASI DAN PENCAIRAN/PENYALURAN HIBAH KE DAERAH



MEKANISME PERENCANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN – IPDMIP PROPINSI dan KABUPATEN (On Granting)



MEKANISME PERENCANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN – IPDMIP APBN/PUSAT



JADWAL PENYUSUNAN AWP DAERAH

TAHAPAN	JADWAL
Penyusunan OWP, AWP (2017) 2018 masing-masing Daerah	4-9 Agustus 2017
Konsultasi, Verifikasi dan Asistensi OWP, AWP (2017) 2018 dengan NPMU dan NPIU	10-12 Agustus 2017 (Workshop)
Pembahasan akhir OWP, AWP (2017) 2018 di masing-masing Daerah dan disahkan oleh Pejabat Berwenang	15-31 Agustus 2017
Penyerahan usulan OWP, AWP (2017) 2018 dari Kabupaten / Propinsi ke masing-masing NPIU	1-8 September 2017
Penyerahan OWP, AWP (2017) 2018 dari Kabupaten / Propinsi yang telah disetujui oleh NPIU kepada NPMU	25 September 2017
Pengesahan OWP, AWP (2017) 2018 oleh NPMU	2 Oktober 2017
Persetujuan OWP, AWP (2017) 2018 oleh NSCWR	9 Oktober 2017
Penyusunan DPA di daerah (Kegiatan AWP (2017) 2018)	10 Oktober - November 2017

PENJELASAN UMUM KEGIATAN-KEGIATAN IPDMIP

Sebagai dasar Penyusunan AWP/AWP

- A. Unit Pelaksana Program/PIU masing-masing Kantor Dinas dan Unit Pengelola Program/PMU masing-masing BappedA harus **SEGERA** dibentuk : **Paling lambat 31 Agustus**
- B. Dasar pembentukan :
 - Loan document ADB
 - Loan document IFAD
 - Surat Penetapan Alokasi Pinjaman Luar Negeri yang Dihilahkan kepada Pemerintah Daerah dari menteri keuangan
 - SK NPMU dari Dirjen SDA-PUPR

1. TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM)
2. PENYUSUNAN PSETK
3. PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN IRIGASI (RP₂I)
4. PELAKSANAAN SURVEI IDENTIFIKASI DAN DESAIN/DETIL ENGINEERING DESAIN (SID/DED)

TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM)

1. Pedoman TPM
Disusun oleh Bangda
Disosialisasikan oleh Banda
2. Pengadaan TPM dan Koordinator
Oleh 14 Propinsi kecuali Banten dan Jawa Tengah
Oleh BBWS C3 (Banten) dan BBWS Pemali Juana (Jawa Tengah)
3. Pelatihan TPM dan Koordinator
ToT oleh OP kepada peserta dari 14 Propinsi dan 2 BBWS
Pelatihan oleh 14 Propinsi dan 2 BBWS
4. TPM di tempatkan di Daerah Irigasi, Koordinator TPM di tiap Kabupaten
Pengawasan Koordinator TPM oleh Konsultan Bangda
5. Target: TPM dan Koordinator TPM sudah **beroperasi di TA. 2018**

TUGAS TPM&Koordinator TPM

- ❖ Mendampingi P3A/GP3A hingga **aktif** sesuai dengan panduan P3A (Penyusunan AD/ART, Pertemuan Rutin, Pemeliharaan Jaringan tersier partisipasi, Penyusunan PSETK, Partisipasi perencanaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dll)
- ❖ Mendampingi P3A/GP3A dan GAPOKTAN dalam meningkatkan usaha produktif berbasis lahan irigasi

PENYUSUNAN PSETK

1. Panduan PSETK disusun oleh BANGDA dan disosialisasikan oleh BANGDA
2. Pelaksanaan PSETK Kewenangan Propinsi dan Kabupaten oleh Bappeda Propinsi dan Kabupaten
3. Pelaksanaan PSETK Kewenangan Pusat dilakukan oleh Balai/Balai Besar
4. PSETK dilaksanakan terhadap seluruh Daerah Irigasi yang ada di 74 Kabupaten
5. PSETK di Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan luasan DI:
 - > 200 ha
 - 101 ha – 200 ha
 - < 100 ha
6. Penyusunan PSETK dilakukan bersama dengan petani dan difasilitasi oleh TPM

1. PSETK menjadi masukan untuk Penyusunan RP₂I dan SID/DED
2. PSETK terakhir dilaksanakan di 2019

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN IRIGASI (RP₂I)

1. Panduan disusun oleh IRWA
2. Sosialisasi dan Pelatihan RP₂I dilakukan oleh 16 Balai di tingkat Propinsi
3. Pembentukan Tim Penyusunan RP₂I di tetapkan oleh Bappeda Kabupaten
4. Sosialisasi RP₂I oleh Bappeda Kabupaten
5. Pengisian Data-Data RP₂I oleh Dinas PSDA Propinsi dan Kabupaten
6. Penyusunan RP₂I oleh Dinas PSDA Kabupaten
7. Pengesahan RP₂I oleh Bupati
8. **TARGET : Total 74 RP₂I ditetapkan oleh Bupati di 2021**

RP₂I dapat dilaksanakan setelah

- A. Software RP₂I selesai di update oleh NPIU OP - 2017
- B. PAI selesai dilaksanakan oleh NPIU OP - 2019
- C. PSETK seluruh DI di wilayah Program telah DISUSUN oleh masing-masing kewenangan - 2019

PELAKSANAAN SURVEI IDENTIFIKASI DAN DESAIN/DETIL ENGINEERING DESAIN (SID/DED)

1. Panduan SID/DED disusun oleh IRWA/Balai
2. SID/DED seluruh Kewenangan dilaksanakan oleh Balai/Balai Besar untuk menjamin kualitas perencanaan
3. Rehabilitasi dan Fasilitasi OP dilakukan sesuai dengan Kewenangan sesuai dengan desain SID/DED yang telah disusun oleh Balai

FORMAT OWP DAN FORMAT AWP

LIHAT DI EXCEL FILE

Langkah Penyusunan OWP

1. Pelajari dan pahami daftar kegiatan di masing-masing unit pelaksana program
2. Prioritas pada kegiatan yang **harus bersinergi** dengan pihak terkait; diskusikan jadwal pelaksanaan agar terintegrasi
3. Tetapkan DI Kesepakatan
4. Susun jadwal kegiatan yang di tingkat DI, sesuai dengan urutan yang ditetapkan
5. AWP disusun setelah OWP terbentuk atau disetujui oleh NPIU terkait

A. Unit Pelaksana Program/PIU masing-masing Kantor Dinas dan Unit Pengelola Program/PMU masing-masing BappedA harus **SEGERA** dibentuk : **Paling lambat**

31 Agustus

B. Dasar pembentukan :

- Loan document ADB
- Loan document IFAD
- Surat Penetapan Alokasi Pinjaman Luar Negeri yang Dihilangkan kepada Pemerintah Daerah dari menteri keuangan
- SK NPMU dari Dirjen SDA-PUPR



SEKIAN DAN TERIMA KASIH